

**BIRO HUKUM**  
**Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**  
**Tahun Anggaran 2022**





**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**RKA SKPD**

**Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2022**

**Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM**

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.796.707.000</b>
5.1	BELANJA OPERASI	2.796.707.000
5.1.1	Belanja Pegawai	680.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.796.027.000

Semarang, 19 Oktober 2021

**KEPALA BIRO HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

(IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M.Hum)  
197112071995031003



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2022

**RKA  
BELANJA SKPD**

**Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM**

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

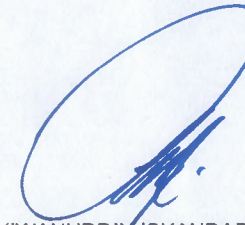
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Sub urusan	Prog ram	Kegi atan	Sub Kegi atan				T - 1	T				T + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			0	2.796.707.000	0	0	0	2.796.707.000	3.370.949.000
	4.01				SEKRETARIAT DAERAH			0	2.796.707.000	0	0	0	2.796.707.000	3.370.949.000
		01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			0	481.707.000	0	0	0	481.707.000	650.949.000
			1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000
			1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	181.707.000	0	0	0	181.707.000	350.949.000
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	275.000.000
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	31.707.000	0	0	0	31.707.000	75.949.000
		05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			0	2.315.000.000	0	0	0	2.315.000.000	2.720.000.000
			1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			0	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	1.700.000.000
				01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			0	400.000.000	0	0	0	400.000.000	525.000.000
				02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	125.000.000
				03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			0	275.000.000	0	0	0	275.000.000	340.000.000
				04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			0	625.000.000	0	0	0	625.000.000	710.000.000
			1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum			0	915.000.000	0	0	0	915.000.000	1.020.000.000

				01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			0	665.000.000	0	0	0	665.000.000	715.000.000
				02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			0	250.000.000	0	0	0	250.000.000	305.000.000
<b>Jumlah</b>								<b>0</b>	<b>2.796.707.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.796.707.000</b>	<b>3.370.949.000</b>

Semarang, 19 Oktober 2021


**KEPALA BIRO HUKUM**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



(IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum)

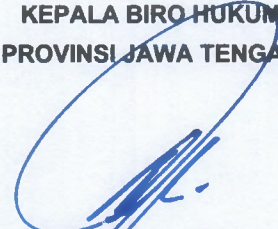
NIP. 197112071995031003

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022					
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.01 - PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					
Sasaran Program (outcome)	: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah					
Capaian Program (impact)	: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah					
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah					
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM					
Alokasi Tahun T-1	:					
Alokasi Tahun T	: Rp300.000.000					
Alokasi Tahun T+1	: Rp300.000.000					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum				100%	
Masukan	Tersedia Dana				Rp300.000.000	
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1Laporan	
Hasil	Nilai IKM Biro Hukum				78 Angka	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
<b>Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>						
Sub Kegiatan	: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
Sumber Pendanaan	: APBD					
Lokasi	: BIRO HUKUM					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan DBHCHT 12 Laporan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2022			Sampai 31 Desember 2022		
Keterangan	: Prioritas Nasional Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			300.000.000		300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			300.000.000		300.000.000
5.1.1	Belanja Pegawai			680.000		680.000
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			680.000		680.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium			680.000		680.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			680.000		680.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			299.320.000		299.320.000
5.1.2.1	Belanja Barang			16.163.000		16.163.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			16.163.000		16.163.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis			4.937.000		4.937.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3.801.000		3.801.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.425.000		7.425.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			179.800.000		179.800.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			15.000.000		15.000.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			15.000.000		15.000.000

5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			64.800.000		64.800.000
5.1.2.2.5.43	Belanja Sewa Hotel			64.800.000		64.800.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi			100.000.000		100.000.000
5.1.2.2.8.13	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya			100.000.000		100.000.000
5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas			103.357.000		103.357.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			103.357.000		103.357.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			103.357.000		103.357.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>300.000.000</b>

Semarang, 19 Oktober 2021

**KEPALA BIRO HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**



(IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M.Hum)

NIP. 197112071995031003

Keterangan :


Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	KABID ANGGARAN	
2	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	KASUBBID ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
3	FARADINA KRISLIANITA, S.H	199309062019022009	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	
4	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	KABID PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
5	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	KASUBBID PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
6	IBNU KUNCORO, SE, MM	196312241986031008	PERENCANA AHLI MADYA	

\*) coret yang tidak perlu

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022					
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.01 - PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					
Sasaran Program (outcome)	: Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah					
Capaian Program (impact)	: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah					
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah					
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM					
Alokasi Tahun T-1	:					
Alokasi Tahun T	: Rp181.707.000					
Alokasi Tahun T+1	: Rp350.949.000					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum				100%	
Masukan	Tersedia Dana				Rp181.707.000	
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum				2Dokumen	
Hasil	Nilai IKM Biro Hukum				78 Angka	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
<b>Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>						
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: APBD					
Lokasi	: BIRO HUKUM JAWA TENGAH					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Hukum 12 Bulan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2022			Sampai 31 Desember 2022		
Keterangan	: Prioritas Nasional Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			31.707.000		31.707.000
5.1	BELANJA OPERASI			31.707.000		31.707.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			31.707.000		31.707.000
5.1.2.1	Belanja Barang			31.707.000		31.707.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			31.707.000		31.707.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis			18.897.000		18.897.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			12.330.000		12.330.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos			480.000		480.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>31.707.000</b>
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: APBD					
Lokasi	: BIRO HUKUM JAWA TENGAH					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum 12 Bulan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2022			Sampai 31 Desember 2022		
Keterangan	: Prioritas Nasional Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			150.000.000		150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			150.000.000		150.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			150.000.000		150.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			18.450.000		18.450.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			18.450.000		18.450.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			17.100.000		17.100.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			1.350.000		1.350.000
5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas			131.550.000		131.550.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			131.550.000		131.550.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			131.550.000		131.550.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>150.000.000</b>

Semarang, 19 Oktober 2021

**KEPALA BIRO HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

(IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum)

NIP. 197112071995031003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :


Catatan Hasil Pembahasan :

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	KABID ANGGARAN	
2	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	KASUBBID ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
3	FARADINA KRISLIANITA, S.H	199309062019022009	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	
4	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	KABID PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
5	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	KASUBBID PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
6	IBNU KUNCORO, SE, MM	196312241986031008	PERENCANA AHLI MADYA	

\*) coret yang tidak perlu



	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022					
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
Sasaran Program (outcome)	: Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah					
Capaian Program (impact)	: Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Kegiatan	: 4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah					
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM					
Alokasi Tahun T-1	:					
Alokasi Tahun T	: Rp1.400.000.000					
Alokasi Tahun T+1	: Rp1.700.000.000					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan				95%	
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi				95%	
Masukan	Tersedia Dana				Rp1.400.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				12Dokumen	
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur				12Dokumen	
	Jumlah dokumen kajian produk hukum				12Dokumen	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota				Dokumen	
Hasil	Persentase efektifitas produk hukum daerah				95%	
	Persentase efektifitas produk hukum daerah				95%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
<b>Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>						
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan					
Sumber Pendanaan	: APBD					
Lokasi	: BIRO HUKUM JAWA TENGAH					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah 15 Raperda Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 12 Laporan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2022			Sampai 31 Desember 2022		
Keterangan	: Prioritas Nasional Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			400.000.000		400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			400.000.000		400.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			400.000.000		400.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			27.260.000		27.260.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			27.260.000		27.260.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis			9.370.000		9.370.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.930.000		1.930.000

5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.960.000		15.960.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			222.680.000		222.680.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			222.680.000		222.680.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			222.680.000		222.680.000
5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas			150.060.000		150.060.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			150.060.000		150.060.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			150.060.000		150.060.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>400.000.000</b>

Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi : BIRO HUKUM  
JAWA TENGAH

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 12  
Laporan

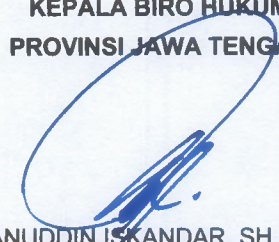
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Keterangan : Prioritas Nasional Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			100.000.000		100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			100.000.000		100.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			100.000.000		100.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			43.940.000		43.940.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			43.940.000		43.940.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis			21.965.000		21.965.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			15.900.000		15.900.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6.075.000		6.075.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			46.680.000		46.680.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			44.772.000		44.772.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			41.772.000		41.772.000
5.1.2.2.1.46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			3.000.000		3.000.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			1.908.000		1.908.000
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			1.680.000		1.680.000
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			102.000		102.000
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			126.000		126.000
5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas			9.380.000		9.380.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			9.380.000		9.380.000

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			9.380.000		9.380.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>100.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya</b>						
<b>Sumber Pendanaan : APBD</b>						
<b>Lokasi : BIRO HUKUM JAWA TENGAH</b>						
<b>Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 12 Laporan Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 12 Laporan</b>						
<b>Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022</b>						
<b>Keterangan : Prioritas Nasional Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			275.000.000		275.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			275.000.000		275.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			275.000.000		275.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			22.831.000		22.831.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			22.831.000		22.831.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis			8.281.000		8.281.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3.450.000		3.450.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.850.000		8.850.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			2.250.000		2.250.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			170.360.000		170.360.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			168.452.000		168.452.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			126.680.000		126.680.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			41.772.000		41.772.000
5.1.2.2.2	Belanja luran Jaminan/Asuransi			1.908.000		1.908.000
5.1.2.2.2.5	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			1.680.000		1.680.000
5.1.2.2.2.6	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			102.000		102.000
5.1.2.2.2.7	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN			126.000		126.000
5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas			81.809.000		81.809.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			81.809.000		81.809.000

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			81.809.000		81.809.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>275.000.000</b>
Sub Kegiatan : Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : APBD						
Lokasi : BIRO HUKUM JAWA TENGAH						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I 90 Dokumen Jumlah Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II 95 Dokumen Jumlah Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III 95 Dokumen						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022						
Keterangan : Prioritas Nasional Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			625.000.000		625.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			625.000.000		625.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			625.000.000		625.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			119.005.000		119.005.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			119.005.000		119.005.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis			18.590.000		18.590.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			22.115.000		22.115.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			78.300.000		78.300.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			199.040.000		199.040.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			195.224.000		195.224.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			108.680.000		108.680.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			83.544.000		83.544.000
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV			3.000.000		3.000.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			3.816.000		3.816.000
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			3.360.000		3.360.000
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			204.000		204.000
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			252.000		252.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			306.955.000		306.955.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			306.955.000		306.955.000

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		306.955.000	306.955.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>625.000.000</b>
<p>Semarang, 19 Oktober 2021  <b>KEPALA BIRO HUKUM  PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>  (IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M.Hum) NIP. 197112071995031003				

Keterangan :


Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

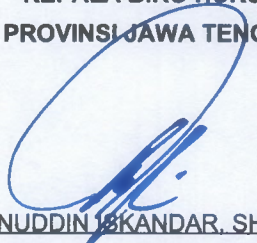
**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	KABID ANGGARAN	
2	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	KASUBBID ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
3	FARADINA KRISLIANITA, S.H	199309062019022009	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	
4	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	KABID PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
5	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	KASUBBID PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
6	IBNU KUNCORO, SE, MM	196312241986031008	PERENCANA AHLI MADYA	

\*) coret yang tidak perlu

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022					
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					
Program	: 4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
Sasaran Program (outcome)	: Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah					
Capaian Program (impact)	: Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum					
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah					
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.02 - BIRO HUKUM					
Alokasi Tahun T-1	:					
Alokasi Tahun T	: Rp915.000.000					
Alokasi Tahun T+1	: Rp1.020.000.000					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani				95%	
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM				95%	
Masukan	Tersedia Dana				Rp915.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara				12Dokumen	
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah				12Dokumen	
Hasil	Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum				95%	
	Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum				95%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum					
Sumber Pendanaan	: APBD					
Lokasi	: BIRO HUKUM JAWA TENGAH					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara 10 Perkara Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu 200 Perkara					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2022			Sampai 31 Desember 2022		
Keterangan	: Prioritas Nasional Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			665.000.000		665.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			665.000.000		665.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			665.000.000		665.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			37.110.000		37.110.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			37.110.000		37.110.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis			4.590.000		4.590.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3.270.000		3.270.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			29.250.000		29.250.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			497.000.000		497.000.000

5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			497.000.000		497.000.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			117.000.000		117.000.000
5.1.2.2.1.5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara			380.000.000		380.000.000
5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas			130.890.000		130.890.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			130.890.000		130.890.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			130.890.000		130.890.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>665.000.000</b>
<b>Sub Kegiatan : Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM</b>						
<b>Sumber Pendanaan : APBD</b>						
<b>Lokasi : BIRO HUKUM JAWA TENGAH</b>						
<b>Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Fasilitas Implementasi HAM Kabupaten/kota 35 Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 7 Sengketa</b>						
<b>Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022</b>						
<b>Keterangan : Prioritas Nasional Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			250.000.000		250.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			250.000.000		250.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			250.000.000		250.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			14.518.000		14.518.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			14.518.000		14.518.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis			2.710.000		2.710.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.458.000		1.458.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.350.000		10.350.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			144.750.000		144.750.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			144.750.000		144.750.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			144.750.000		144.750.000
5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas			90.732.000		90.732.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			90.732.000		90.732.000

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		90.732.000	90.732.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>250.000.000</b>
<p>Semarang, 19 Oktober 2021</p> <p><b>KEPALA BIRO HUKUM</b></p> <p><b>PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>  <p>(IWANUDDIN ISKANDAR, SH. M.Hum)</p> <p>NIP. 197112071995031003</p>				
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	KABID ANGGARAN	
2	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	KASUBBID ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
3	FARADINA KRISLIANITA, S.H	199309062019022009	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	
4	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	KABID PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
5	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	KASUBBID PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
6	IBNU KUNCORO, SE, MM	196312241986031008	PERENCANA AHLI MADYA	

\*) coret yang tidak perlu